



Judul : Editorial : Catch bigger fish, KPK
Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Surat Kabar : Jakarta Post
Halaman : 6

Pemilu 15 Mei 2024 Perhitungkan Sengketa

Simulasi pemerintah mencakup memperpendek masa kampanye dan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden.

EMIR CHAIRULLAH
emir@mediaindonesia.com

PEMERINTAH mengusulkan agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei 2024. Simulasi yang dilakukan pemerintah telah memperhitungkan antisipasi proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengemukakan hal itu dalam keterangan pers seusai rapat

internal kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemfinalan usul pemerintah mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024, kemarin.

Rapat tersebut juga dihadiri antara lain oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Tanggal 15 Mei ini adalah tang-

gal yang dianggap paling rasional untuk diajukan kepada KPU dan Dewan Perwakilan Rakyat," ungkap Mahfud.

Dalam rapat tersebut, pemerintah melakukan simulasi empat tanggal pemilihan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2024, yaitu 24 April, 15 Mei, 8 Mei, atau 6 Mei. Simulasi tersebut menyangkut sejumlah hal yang terkait dengan tahapan pemilu seperti memperpendek kegiatan pemilu agar efisien waktu dan uang, pemendekan masa kampanye, dan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden tidak terlalu lama.

"Termasuk mengantisipasi mungkin ada peradilan di Mahkamah Konstitusi atau mungkin ada putaran kedua dihitung semuanya. Kemudian memperhitungkan hari besar keagamaan

dan hari besar nasional," papar Mahfud.

Jadwal yang diusulkan pemerintah cukup jauh dari usul Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang menginginkan pencoblosan Pemilu 2024 diadakan pada Februari 2024. Menurut Mahfud, pemerintah menilai waktu usulan KPU terlalu panjang baik ke belakang maupun ke depan.

"Panjang ke belakang artinya tahapan pemilu berlangsung 20 bulan. Ke depannya, juga menjadi panjang, yaitu dari Februari ke Oktober 2024. Kok, lama sekali pelantikan presiden," terangnya.

Tunggu rapat

Saat dimintai tanggapan tentang usul pemerintah, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI I Dewa Kade Wiarso Raka Sandi mengatakan jadwal pemilu akan

dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) berikutnya dengan DPR. Sejauh ini, RDP dijadwalkan berlangsung pada 6 Oktober 2021. "Akan disampaikan pada rapat dengar pendapat selanjutnya," ujar Raka.

Sebelumnya, KPU RI menyatakan akan mengkaji ulang jadwal Pemilu 2024 sesuai dengan keputusan hasil rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP), dan Komisi II, Kamis (16/9).

Mendagri Tito Karnavian ketika itu mengatakan pemerintah berharap agar pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan pada April atau bahkan Mei 2024. Hal itu bertujuan durasi tahapan pemilu lebih pendek sehingga isu pencalonan pemilu tidak mengganggu kondusifitas keamanan di masyarakat.

Di sisi lain, KPU meminta pemungutan suara digelar 21 Februari 2024 karena memperhitungkan jeda dengan pilkada yang dilaksanakan 27 November 2024. Dengan begitu, bila ada sengketa hasil pemilu, itu tidak banyak beririsan dengan tahapan pilkada. (Ind/P-2)